



## Menakar Perspektif Masyarakat Kalimantan Selatan Terhadap Rencana Pilkada Serentak di Masa Transisi Pandemi Covid-19

<sup>1</sup>Muhammad Torieq Abdillah, <sup>2</sup>Muhamad Ishaac, <sup>3</sup>Siti Mukhalafatun, <sup>4</sup>Anwar Hafidzi, <sup>5</sup>Arie Sulistyoko, <sup>6</sup>Bahran

<sup>1,2</sup>Mahasiswa Fakultas Syariah; <sup>3</sup>Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

<sup>4,5,6</sup>Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari

Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

### Article Info

#### Article history:

Received July 12<sup>th</sup>, 2020

Revised Nov 20<sup>th</sup>, 2020

Accepted Des 15<sup>th</sup>, 2020

#### Keyword:

Pandemi Covid-19;  
Perspektif Masyarakat  
Kalimantan Selatan;  
Pilkada Serentak.

**Abstract:** Pandemic Covid-19, which has not yet ended in the area of South Kalimantan inhibit different agenda, one of which is the agenda of the simultaneous Pilkada scheduled to be held on December 9, 2020 in the middle of the fragility of the spread of Covid-19. Through Perppu No. 2 by 2020, the implementation of the simultaneous Pilkada is planned to be held by applying the protocol of health strictly to the community. The government believes the simultaneous Elections later will be a success upon acceptance of the community towards the implementation of government policy related to the implementation of the Elections simultaneously with the determination of the protocol strict health it. It can be said that the acceptance of the community towards the policy of the simultaneous Pilkada plays an important role in the success of the agenda of the government.

This research uses qualitative research method with case study approach of exploratory against the perspective of the people of South Kalimantan against the implementation of Pilkada in the middle of the pandemic Covid-19, which the data taken from 83 South Kalimantan spread across 13 Districts/Cities in South Kalimantan, with the use of media Google Form as a means of surveys, interviews via WhatsApp, interviews face-to-face, and with the documents related to the discussion of the research.

**Abstrak:** Pandemi Covid-19 yang belum berakhir di daerah Kalimantan Selatan menghambat berbagai agenda, salah satunya adalah agenda Pilkada serentak yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang di tengah rawannya penyebaran Covid-19. Melalui Perppu No. 2 Tahun 2020, pelaksanaan Pilkada serentak tersebut rencananya akan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat

---

terhadap masyarakat. Pemerintah meyakini Pilkada serentak nanti akan sukses atas penerimaan masyarakat terhadap penerapan kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan Pilkada serentak dengan penetapan protokol kesehatan yang ketat itu. Maka dapatlah dikatakan bahwa penerimaan masyarakat terhadap kebijakan Pilkada serentak tersebut memegang peranan penting dalam suksesnya agenda pemerintah itu.

Namun, berbagai gelombang penolakan timbul dari berbagai kalangan, salah satunya dari kalangan tokoh masyarakat dalam sebagaimana disebutkan dalam penelitian Singgih dan Adam, banyak tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat menolak agenda Pilkada serentak tersebut. Keputusan pemerintah terkait penetapan Pilkada serentak digelar di tengah pandemi itu dinilai tidak tepat oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Hasil penelitian di lapangan menyebutkan 61,7% masyarakat Kalimantan Selatan tidak setuju dan bahkan 9,8% diantaranya sangat tidak setuju dengan dilaksanakannya Pilkada serentak di tengah pandemi itu. Mereka menilai keputusan yang diambil oleh pemerintah tidaklah tepat karena dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru Covid-19 pasca Pilkada. 75,9% dari mereka meyakini bahwa masyarakat tidak akan mau mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah ketika pelaksanaan Pilkada serentak berlangsung. Mereka berharap pemerintah kembali merevisi jadwal pelaksanaan Pilkada serentak tersebut dan melakukan penundaan terhadap pelaksanaan Pilkada serentak sampai pandemi benar-benar berakhir agar tidak ada lagi kekhawatiran dari timbulnya klaster baru pasca Pilkada.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksploratif terhadap perspektif masyarakat Kalimantan Selatan terhadap pelaksanaan Pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19 yang diambil datanya dari 83 masyarakat Kalimantan Selatan yang tersebar di 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, dengan menggunakan media Google Form sebagai alat survei, wawancara melalui WhatsApp, wawancara secara tatap muka, dan dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.



© 2020 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.  
This is an open access article under the CC BY license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

---

**Corresponding Author:** Email: [mtabdillah11@gmail.com](mailto:mtabdillah11@gmail.com)

---

## Pendahuluan

Tahun 2020 merupakan tahun di mana 'seharusnya' kembali digelar pelaksanaan Pilkada serentak yang memang menjadi agenda setiap 5 tahunan sekali.<sup>1</sup> Hal ini telah

---

<sup>1</sup> Cakra Arbas, *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilu pada di Provinsi Aceh*, (Jakarta: Softmedia Penerbitan, 2012), h. 31.

diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 dan UU Nomor 9 Tahun 2015 terkait Pilkada serentak.<sup>2</sup>

Pada tahun yang sama di tahun 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat Indonesia atas dampak dari pandemi virus Covid-19.<sup>3</sup> Berbagai kebijakan yang semulanya telah direncanakan terpaksa ditunda dan diubah teknis pelaksanaannya, salah satunya adalah kebijakan terkait Pilkada serentak yang rencananya dilaksanakan sebelumnya pada bulan September 2020 terpaksa ditunda ke bulan Desember 2020.<sup>4</sup> Namun, pada kenyataannya perkembangan Covid-19 di Indonesia hingga kini (Oktober 2020) belum menunjukkan peredaan. Disebutkan pada data dari Satgas Penanganan Covid-19 di laman [covid19.go.id](https://covid19.go.id) pada tanggal 24 Oktober 2020 bertambah sebanyak 4.070 orang yang menjadikan sebagian daerah di Indonesia rawan Covid-19, termasuk beberapa daerah di Kalimantan Selatan yang menurut data lanjutan yang kami kutip dari situs [corona.kalselprov.go.id](https://corona.kalselprov.go.id) menyebutkan sekitar 647 orang masih terinfeksi Covid-19 dan dalam perawatan serta 282 orang diduga Covid-19 menyebabkan Kalimantan Selatan masih terbilang rawan Covid-19.<sup>5</sup>

Namun, pemerintah justru bersikeras untuk menjadikan tanggal 9 Desember 2020 sebagai hari dilaksanakannya Pilkada serentak.<sup>6</sup> Melalui Perppu No. 02 Tahun 2020, pemerintah menetapkan Pilkada serentak tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 dengan mengedepankan prioritas protokol kesehatan secara ketat.<sup>7</sup> Pemerintah meyakini bahwa pelaksanaan Pilkada serentak nanti akan aman dari Covid-19 karena akan mengedepankan protokol kesehatan secara ketat.<sup>8</sup> Pemerintah meyakini akan urgensi pelaksanaan Pilkada serentak ini sehingga walau bagaimanapun pemerintah yakin masyarakat akan menerima dan turut menyukseskan Pilkada serentak yang telah direncanakan itu.

Untuk melihat sukses tidaknya pelaksanaan pemilihan, ketua Bawaslu Abhan, pernah mengatakan bahwa ada empat elemen penting yang menentukan sukses tidaknya pemilihan, salah satunya adalah elemen masyarakat.<sup>9</sup> Masyarakat memegang peranan kunci untuk mewujudkan Pilkada yang sukses dengan tanpa kekhawatiran timbul klaster baru pasca Pilkada nanti. Perspektif masyarakat akan pelaksanaan Pilkada

---

<sup>2</sup> [news.detik.com/berita/d-2870142/jokowi-sahkan-uu-pilkada-serentak](https://news.detik.com/berita/d-2870142/jokowi-sahkan-uu-pilkada-serentak), diakses pada hari Minggu, 25 Oktober 2020 pukul 7.04 WIB.

<sup>3</sup> Rahayu Asy'ari, "Pengertian Covid-19 dan Bentuk Partisipasi dalam Memeranginya", Makalah Unesa, 2020, h. 3.

<sup>4</sup> [politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1363-wabah-covid-19-dan-pilkada-serentak-2020](https://politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1363-wabah-covid-19-dan-pilkada-serentak-2020), diakses pada hari Minggu, 25 Oktober 2020 pukul 7.27 WIB.

<sup>5</sup> [covid19.go.id](https://covid19.go.id), diakses pada hari Minggu, 25 Oktober 2020 pukul 7.31 WIB.

<sup>6</sup> [m.cnnindonesia.com/nasional/20200921203043-32-549113/dpr-pemerintah-sepakat-pilkada-2020-tetap-9-desember](https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200921203043-32-549113/dpr-pemerintah-sepakat-pilkada-2020-tetap-9-desember), diakses pada hari Senin, 26 Oktober 2020 pukul 19.22 WIB.

<sup>7</sup> [merdeka.com/politik/pilkada-serentak-disepakati-digelar-9-desember-2020.html](https://merdeka.com/politik/pilkada-serentak-disepakati-digelar-9-desember-2020.html), diakses pada hari Senin, 26 Oktober 2020 pukul 19.25 WIB.

<sup>8</sup> [kompas.tv/amp/article/110503/videos/walau-kasus-corona-meningkat-pemerintah-kukuh-gelar-pilkada-serentak-2020](https://kompas.tv/amp/article/110503/videos/walau-kasus-corona-meningkat-pemerintah-kukuh-gelar-pilkada-serentak-2020), diakses pada hari Kamis, 29 Oktober 2020 pukul 16.51 WIB.

<sup>9</sup> [bawaslu.go.id/id/berita/abhan-jabarkan-empat-elemen-penentu-kesuksesan-pemilu](https://bawaslu.go.id/id/berita/abhan-jabarkan-empat-elemen-penentu-kesuksesan-pemilu) diakses pada hari Kamis, 29 Oktober 2020 pukul 17.01 WIB.

serentak yang pelaksanaannya tentu 'berbeda' dari sebelumnya tentu menjadi kunci dalam menyukseskan kebijakan pemerintah tersebut.

Dalam rangka menyiapkan masyarakat, berbagai cara telah ditempuh oleh pemerintah salah satunya melakukan sosialisasi melalui KPU sebagaimana yang telah diwawancarai oleh kami kepada salah seorang anggota KPU kota Banjarmasin, yang menyebutkan mereka telah melakukan sosialisasi. Namun tidak mengetahui secara pasti apakah masyarakat telah siap dan setuju untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak pada bulan Desember mendatang atau justru menolak dan tidak setuju akan dilaksanakannya Pilkada serentak nanti.<sup>10</sup> Atas dasar inilah, pentingnya mengadakan penelitian untuk mengetahui sejauh mana perspektif masyarakat akan pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang.

### Metode Penulisan

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang sering disebut pula memakai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang digunakan dalam pengertian (bersifat cerita) tentang memaparkan atau kejadian. Jadi dalam pengolahan data dan hasil penelitian semua menggunakan deskripsi dari kami.

Rancangan penelitian ini menggunakan metode studi kasus eksplorasi dan pendekatan penelitiannya menggunakan metode studi kasus kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi terkait perspektif masyarakat terhadap rencana pilkada serentak di masa transisi virus Covid-19. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan filsafat *post positivisme* yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana kami sebagai instrumen kunci dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>11</sup>

Pemilihan metode penelitian tersebut dikarenakan kami hendak mendapatkan berbagai informasi terkait yang selektif dari berbagai perspektif masyarakat Kalimantan Selatan terhadap rencana pilkada serentak di masa degradasi transisi virus Covid-19. Kami berusaha untuk menggambarkan perspektif masyarakat pada masalah pilkada yang akan segera dilaksanakan berhubungan dengan transisi '*new normal*' virus Covid-19.

Analisis data dilakukan untuk melihat nilai masing-masing aspek atau deskriptor pada angket. Data Penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.<sup>12</sup> Menurut Sugiyono, analisis terdiri

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan salah seorang anggota KPU Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan yang dilakukan pada hari Selasa, 27 Oktober 2020 pukul 14.00 WIB melalui wawancara langsung.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.9.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kauntitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 336.

dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Pengertian Pilkada

Perubahan tata pemilihan pemimpin di Indonesia telah mulai berlangsung sejak tahun 1999, yaitu dengan dilakukannya Pemilihan Umum (Pemilu) yang paling demokratis dan juga adil sejak 50 tahun belakangan. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung merupakan sebuah keperluan untuk memperbaiki terjadinya kesalahan dalam penerapan otonomi daerah yang diarahkan pada elit di tingkat lokal. Pilkada harus dibuat dalam kantong besar dalam upaya mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis. Sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan sejak adanya perubahan dalam UUD 1945. Salah satunya adalah perubahan yang terjadi dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang mana pemilihannya melalui sistem Pilkada hingga saat ini.<sup>13</sup> Pilkada tersebut merupakan implementasi dari kebebasan masyarakat untuk memilih pemimpinnya. Maka dari itu, Pilkada merupakan upaya mencari pemimpin daerah terbaik dan rangka membentuk masyarakat yang demokratis.<sup>14</sup>

### 2. Konsep Pilkada

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dengan pendekatan normatif. Artinya, ada penekanan pada ide dasar dari demokrasi, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh sebab itu, sistem pemerintahan dilaksanakan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam demokrasi normatif ini, terdapat muncul ide demokrasi yang terkonkretisasi dalam lembaga perwakilan, baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang mana anggota-anggotanya dipilih dari partai politik atau perseorangan (independen) sebagai agregasi dari berbagai kepentingan rakyat. Dengan demikian, Pilkada dilakukan oleh rakyat dalam pemilihan Kepala Daerah, dengan konsep dasar bahwa demokrasi merupakan *political equality*.<sup>15</sup> Konsep tersebut merupakan prinsip keadilan dan kesetaraan harus melekat pada masing-masing rakyat secara individu, sehingga rakyat mampu untuk menjalankan peran dan fungsinya dalam demokrasi, termasuk dalam pelibatan pelaksanaan Pilkada.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Wahyu Widodo, "Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi dan Nilai-nilai Pancasila," *Jurnal Ilmiah CIVIS V*, no. 1 (2015), h. 681-682.

<sup>14</sup> Mokhammad Abdul Aziz, "Pilkada Serentak Melalui DPRD: Sebuah Gagasan Mewujudkan Pilkada Demokratis Perspektif Pancasila dan UUD 1945," *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1, no. 2 (2016), h. 160.

<sup>15</sup> Achmad Arifulloh, "Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermartabat," *Jurnal Pembaharuan Hukum II*, no. 2 (2015), h. 303.

<sup>16</sup> Singgih Choirul Rizki dan Yusuf Adam Hilman, "Menakar Perbedaan Opini dalam Agenda Pelaksanaan Kontestasi Pilkada Serentak di Tengah Covid-19," *JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 4, no. 2 (2020), h. 153.

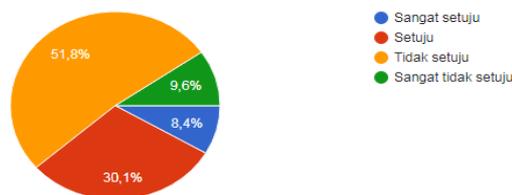
### 3. Perspektif Masyarakat Kalimantan Selatan Terhadap Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19

#### a. Antara Covid-19, Pilkada Serentak, dan Perbedaan Perspektif Masyarakat Kalimantan Selatan

Penyebaran Covid-19 yang begitu cepat dan luas, lamanya waktu diagnosis, serta jumlah kematian yang sangat besar dalam waktu yang relatif singkat mengubah hampir semua lini kehidupan mulai dari bagaimana bersosialisasi, bekerja, dan bahkan mengubah berbagai agenda dan kegiatan menjadi sebuah lingkup perilaku 'normal yang baru'.<sup>17</sup> Pilkada serentak yang mulanya sebuah 'tradisi' berubah menjadi sebuah 'kontroversi'. Seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan, yang mana pada tahun sebelum Covid-19 menyerang, Pilkada serentak diagendakan pada bulan September 2020 namun berubah menjadi tanggal 9 Desember 2020 mengingat Covid-19 yang tidak kunjung mereda demi pencegahan penyebaran Covid-19 dan menghilangkan kekhawatiran masyarakat akan timbulnya kluster baru Covid-19.<sup>18</sup> Namun pada faktanya di lapangan, masyarakat khususnya Kalimantan Selatan masih belum bisa menyetujui penyelenggaraan Pilkada serentak jika Covid-19 masih belum benar-benar berakhir.

Diagram 1:

Apakah Anda setuju rencana Pilkada serentak dilaksanakan sekarang? Meskipun masih dalam masa pandemi Covid-19?  
83 tanggapan



Dari diagram tersebut (diagram 1), dapatlah disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Kalimantan Selatan tidak setuju bahkan sangat tidak setuju dengan pelaksanaan Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Kekhawatiran akan timbulnya kluster barulah yang menjadi penyebab utama mereka tidak setuju dengan rencana Pilkada serentak di masa-masa pandemi saat ini. Hadar Nafis Gumay dalam artikelnya menyebutkan, jika Pilkada serentak dilaksanakan tanpa adanya kesamaan perspektif (paling tidak mayoritas setuju) untuk mengadakan Pilkada di tengah pandemi, maka akan menjadikan Pilkada serentak itu sendiri berantakan, sebagaimana yang telah terjadi pada 20 negara yang menggelar Pilkada di tengah pandemi Covid-19 namun tidak sukses, justru berantakan.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Mangadar Situmorang, "Covid-19 Mengubah Lanskap Konflik Global(?)", *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 1, no. 8 (2020), h. 1.

<sup>18</sup> [m.cnnindonesia.com/nasional/20200908114253-32-543914/dilema-pilkada-di-tengah-pandemi-tunda-atau-lanjut](https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200908114253-32-543914/dilema-pilkada-di-tengah-pandemi-tunda-atau-lanjut) diakses pada Kamis, 29 Oktober 2020 pukul 19.42 WIB.

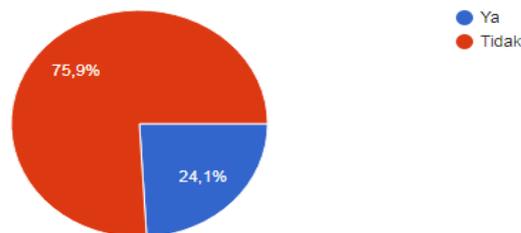
<sup>19</sup> [m.republika.co.id/amp/qcbclw335](https://m.republika.co.id/amp/qcbclw335) diakses pada Kamis, 29 Oktober 2020 pukul 20.18 WIB.

## b. Rendahnya Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan didefinisikan sebagai kesediaan satu pihak untuk mempercayai pihak lain.<sup>20</sup> Dalam hal ini, kepercayaan masyarakat dengan pemerintah dan dengan masyarakat itu sendiri merupakan titik penting dalam menanam perspektif masyarakat. Krisis kepercayaan masyarakat akan keamanan pelaksanaan Pilkada serentak mendatang dan kepatuhan masyarakat akan penerapan protokol kesehatan menjadikan masyarakat Kalimantan Selatan menjadi tidak setuju dengan pelaksanaan Pilkada serentak digelar di tengah pandemi Covid-19.

Diagram 2:

Apakah anda yakin dengan pilkada serentak yg dilaksanakan di masa saat ini seluruh masyarakat akan mematuhi apa yg ditetapkan oleh pemerintah terkait pelaksanaan pilkada serentak ini?  
83 tanggapan



Masyarakat Kalimantan Selatan masih belum percaya satu sama lain baik dengan pemerintah itu sendiri maupun dengan masyarakat lainnya dalam upaya pencegahan klaster baru pasca Pilkada serentak jika memang benar-benar diadakan nantinya. Hal itulah yang menjadi alasan utama mengapa mereka menjadi tidak setuju dengan Pilkada serentak kala Covid-19 belum berakhir.

## 4. Harapan Masyarakat Terkait Pilkada Serentak

Di antara harapan besar masyarakat Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan Pilkada serentak mendatang ini adalah penundaan Pilkada serentak yang rencana digelar pada tanggal 9 Desember 2020 untuk digelar saat pandemi benar-benar berakhir. Krisis kepercayaan mereka dalam pencegahan klaster baru pasca Pilkada membuat mereka berharap Pilkada serentak ditunda dan digelar ketika pandemi benar-benar berakhir sehingga tidak ada kekhawatiran akan timbulnya klaster baru. Seperti yang disebutkan NH dari Kabupaten Tanah Laut, ia khawatir akan timbulnya klaster baru karena masyarakat yang masih belum sepenuhnya mau mematuhi protokol pencegahan Covid-19 dan berharap untuk ditunda sampai pandemi benar-benar berakhir. KN dari Kabupaten Tapin menyebutkan hal senada dengan mengaitkan hal-hal yang seharusnya lebih urgen diperhatikan seperti masalah pendidikan dibandingkan dengan memerhatikan Pilkada serentak pada bulan Desember mendatang.

<sup>20</sup> Vivi Susanti, "Kepercayaan Konsumen dalam Melakukan Pembelian Gadget secara Online", *Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi*, no. 1 (Jurnal tidak diterbitkan, 2013), h. 2.

---

## **Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Pemahaman tentang bahaya Covid-19 di tengah persiapan pelaksanaan Pilkada merupakan suatu persepsi setiap individual bagi pemerintah maupun rakyat untuk menyadari bahwa memiliki potensi klaster baru. Namun, tidak hanya sebatas terkait virus tersebut karena Pilkada juga merupakan suatu hal penting yang mampu memberikan hasil maksimal dengan catatan tidak akan merugikan orang banyak (masyarakat). Kualitas dari pelaksanaan Pilkada tentunya disosialisasikan akan menjadi penting untuk dijunjung tinggi, dengan memenuhi prinsip ideal dan legal. Pemerintah dan masyarakat tentu memiliki cara pandang yang tidak mungkin selamanya bisa sama, dikarenakan banyaknya faktor pengaruh. Namun tidak demikian pada perspektif masyarakat Kalimantan Selatan, bahwa mayoritas masyarakat Kalimantan Selatan sebanyak 51,8% tidak setuju dengan pelaksanaan Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Kekhawatiran akan timbulnya klaster barulah yang menjadi penyebab utama mereka tidak setuju dengan rencana Pilkada serentak di masa-masa pandemi saat ini. Sebanyak 75,9% krisis kepercayaan masyarakat akan keamanan pelaksanaan Pilkada serentak mendatang dan kepatuhan masyarakat akan penerapan protokol kesehatan menjadikan masyarakat Kalimantan Selatan menjadikan tidak setuju dilaksanakan pilkada serentak. Di antara harapan besar masyarakat Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan Pilkada serentak mendatang ini adalah penundaan Pilkada serentak yang rencana digelar pada tanggal 9 Desember 2020 untuk digelar saat pandemi benar-benar berakhir. Selain itu, keputusan maupun kebijakan susulan yang dibuat pemerintah haruslah menjembatani kepentingan orang banyak tanpa menitikberatkan pada kecenderungan terhadap salah satu kelompok masyarakat.

### **2. Saran**

Adapun yang menjadi saran dalam penulisan ini adalah kami menyarankan pemerintah benar-benar terjun ke masyarakat dan dapat menunda pelaksanaan pilkada serentak yang merupakan salah satu solusi yang dinilai ekonomis, efisien, dan efektif sesuai dengan pandangan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Arbas, Cakra. 2012. *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh*. Jakarta: Softmedia Penerbitan.
- Nasution. 2004. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

---

Sukmadinata, Nana Syaodah. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Thaib, Dahlan. 1989. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Jogjakarta: Liberty.

### **Jurnal**

Arifulloh, Achmad. 2015. "Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermartabat." *Jurnal Pembaharuan Hukum II*, no. 2.

Aziz, Mokhammad Abdul. 2016. "Pilkada Serentak Melalui DPRD: Sebuah Gagasan Mewujudkan Pilkada Demokratis Perspektif Pancasila dan UUD 1945." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1*, no. 2.

Rizki, Singgih Choirul dan Yusuf Adam Hilman. 2020. "Menakar Perbedaan Opini dalam Agenda Pelaksanaan Kontestasi Pilkada Serentak di Tengah Covid-19." *JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora 4*, no. 2.

Situmorang, Mangadar. 2020. "Covid-19 Mengubah Lanskap Konflik Global (?)." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 1*, no. 8

Susanti, Vivi. 2013. "Kepercayaan Konsumen dalam Melakukan Pembelian Gadget secara Online." *Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi*, No. 1 Jurnal tidak diterbitkan

Widodo, Wahyu. 2015. "Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi dan Nilai-nilai Pancasila." *Jurnal Ilmiah CIVIS V*, no. 1.

### **Makalah**

Rahayu Asy'ari. 2020. "Pengertian Covid-19 dan Bentuk Partisipasi dalam Memerangnya". Makalah Unesa

### **Internet**

[bawaslu.go.id/id/berita/abhan-jabarkan-empat-elemen-penentu-kesuksesan-pemilu-covid19.go.id](http://bawaslu.go.id/id/berita/abhan-jabarkan-empat-elemen-penentu-kesuksesan-pemilu-covid19.go.id)

[merdeka.com/politik/pilkada-serentak-disepakati-digelar-9-desember-2020.html](http://merdeka.com/politik/pilkada-serentak-disepakati-digelar-9-desember-2020.html),

[kompas.tv/amp/article/110503/videos/walau-kasus-corona-meningkat-pemerintah-kukuh-gelar-pilkada-serentak-2020](http://kompas.tv/amp/article/110503/videos/walau-kasus-corona-meningkat-pemerintah-kukuh-gelar-pilkada-serentak-2020)

[m.cnnindonesia.com/nasional/20200908114253-32-543914/dilema-pilkada-di-tengah-pandemi-tunda-atau-lanjut](http://m.cnnindonesia.com/nasional/20200908114253-32-543914/dilema-pilkada-di-tengah-pandemi-tunda-atau-lanjut)

---

[m.cnnindonesia.com/nasional/20200921203043-32-549113/dpr-pemerintah-sepakat-pilkada-2020-tetap-9-desember](https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200921203043-32-549113/dpr-pemerintah-sepakat-pilkada-2020-tetap-9-desember)

[m.republika.co.id/amp/qcbclw335](https://m.republika.co.id/amp/qcbclw335)

[news.detik.com/berita/d-2870142/jokowi-sahkan-uu-pilkada-serentak](https://news.detik.com/berita/d-2870142/jokowi-sahkan-uu-pilkada-serentak)

[politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1363-wabah-covid-19-dan-pilkada-serentak-2020](https://politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1363-wabah-covid-19-dan-pilkada-serentak-2020)